

KOMITMEN MUHAMMADIYAH DALAM KONTEKS KEBANGSAAN DAN *GOOD GOVERNANCE*

Asep Purnama Bahtiar

Dosen Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Mahasiswa S3 Sosiologi Universitas Padjadjaran, Bandung.
Email: asepdalem69@gmail.com

ABSTRACT

This paper is about the role of Muhammadiyah in good governance. According to the author that the quality of the nation with such responsive, alert and caring personal integrity will be a valuable socio-cultural capital for living independently, sovereign, and authoritative. The basic capital that relies on the quality of resources and integrity of the personality of the nation as it will be the life force of this nation in the era of globalization. This is, among other things, Muhammadiyah's commitment in the context of nationality and good governance in Indonesia.

Keywords: Muhammadiyah, nationality, good governance

التجريد

تبحث هذه الكتابة عن دور المحمدية في الحكومية الرشيدة. عند الكاتب أن جودة الدولة بالنزاهة الشخصية دوما على حالة الإدراك، التأهب والعناية بالتالي ستكون رأس المال الاجتماعي الثقافي الثمين للعيش بالاستقلال، والسيادة والهبة. الإعتماد على رأس المال الأساسي في جودة الموارد والنزاهة الشخصية للدولة يمثل هذه ستكون قوة الحياة لهذه الدولة في عصر العولمة. هذا، من التزام المحمدية في السياق الوطني والحكومة الرشيدة في إندونيسيا.

الكلمات الرئيسية: المحمدية، الدولة، الحكومة الرشيدة

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara-bangsa, tidak terwujud secara otomatis dan terbentuk dengan tiba-tiba. Ada proses dan sejarah panjang di negeri yang terletak di antara dua samudera dan dua benua ini, baik sejarah gemilang dan

kejayaan ketika dulu masih bernama nusantara dengan berbagai wilayah kerajaan dan kesultanan yang berdaulat dan disegani maupun sejarah kalam tatkala wilayah zamrud di khatulistiwa ini dijarah dan dijajah oleh bangsa-bangsa kolonial: Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang.

Kolonialisme dan imperialsme di bumi nusantara itu telah menyeret wilayah-wilayah kekuasaan lokal untuk berdiri sendiri, dan cita-cita persatuan yang sudah mulai dibangun sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit hampir saja sirna. Karena itu, tulis Teuku Jacob, mempersatukan kepulauan Indonesia dengan beratus etnisnya bukanlah pekerjaan mudah. Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* untuk berbagai suku dan dengan negeri-negeri lain turut berperan besar dalam mempersatukan Indonesia. Kemudian agama Islam yang menyebar dari Barat ke Timur membantu membangkitkan solidaritas historis dan memberi pengalaman politik yang sama antara berbagai suku bangsa.¹

Fakta sejarah tersebut hingga sekarang tak terbantahkan, dan menjadi modal sejarah untuk menjaga keutuhan NKRI. Perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan NKRI juga sejak awal sudah dilakukan oleh ormas-ormas Islam, yang keberadaannya sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri. Syarikat Dagang Islam (1911); Persyarikatan Muhammadiyah (1912); Al-Irsyad (1915); Persatuan Islam (1923); dan NU (1926).

Berdasarkan catatan sejarah dan cita-cita nasional, maka alangkah mudahnya jika mengobankan keutuhan NKRI atau menggadaikan kedaulatannya kepada bangsa-

bangsa lain. Di tengah rongrongan ideologi, ancaman konflik (vertikal dan horizontal) dan bahaya disintegrasi dari dalam serta ancaman neo-imperialisme dan neo-liberalisme dari negara-negara maju, maka seluruh komponen bangsa dan kekuatan *civil society* dituntut untuk meningkatkan komitmen kebangsaannya.

MUHAMMADIYAH DAN KOMIT-MEN KEBANGSAAN

Di antara gerakan *civil society* yang terpanggil untuk ambil bagian dalam merawat nasionalisme ini adalah ormas Islam seperti Persyarikatan Muhammadiyah. Komitmen tersebut harus terus dipertahankan secara dinamis, sebab akan memberikan andil dari keberadaan *civil society* bagi penerapan *good governance* di negeri ini. Paling tidak ada tiga alasan mengapa organisasi Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 ini bersikap apresiatif dan proaktif isu dan konsep *good governance*.

Pertama, latar belakang dan faktor berdirinya Muhammadiyah tidak bisa lepas dari keprihatinan dan keberpihakan KH. Ahmad bersama para pengikutnya atas nasib umat Islam dan bangsa Indonesia waktu itu yang menjadi korban kolonialisme dan imperialsme (Belanda dan Jepang). Sebagai negeri

¹Teuku Jacob, 2004, *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

jajahan, maka kehidupan penduduk bumi putera rata-rata berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan di bidang pendidikan.

Kedua, Muhammadiyah juga ikut membidani kelahiran Republik Indonesia, karena sejak awal para tokoh dan pucuk pimpinan serta para anggota dan kader Muhammadiyah telah ikut memperjuangkannya. Para tokoh Muhammadiyah yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah republik ini, antara lain: KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, Prof. Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasman Singodimedjo, KH. Ahmad Badawi, dsb.

Ketiga, program kerja dan kegiatan serta amal usaha yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dihidmatkan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah (yang berjumlah ribuan) mulai tingkat prasekolah, pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi; ditambah dengan rumah sakit, poliklinik, rumah bersalin, panti asuhan, dan sebagainya secara terbuka dioperasikan untuk kepentingan publik.

Prof. Dr. HA Mukti Ali dalam ceramah subuh di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1988 pernah mengatakan, "Kalau kita mau

sebentar merenungkan tentang cita-cita Muhammadiyah yang diletakkan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, maka orang dapat menyimpulkan cita-cita perjuangan itu dalam hal-hal di bawah ini:

1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam;
2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern;
3. Reformasi ajaran-ajaran dan pendidikan Islam;
4. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar; dan
5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan.²

Lima poin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. A. Mukti Ali tadi secara eksplisit telah menunjukkan komitmen kebangsaan yang tidak lepas dari komitmen keagamaan menurut paham Muhammadiyah. Sebagai ormas Islam, komitmen kebangsaan seperti ini menjadi nilai tambah yang berharga bagi Muhammadiyah.

Berkaitan dengan *good governance*, komitmen kebangsaan ini menggarisbawahi beberapa hal. *Pertama*, krisis multidimensi yang melanda negara-bangsa ini hingga sekarang masih meninggalkan eksekusi dan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, akibat dari eksekusi krisis itu, sikap

²A. Mukti Ali, 1991, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, hlm. 143.

hidup dan realitas kehidupan bangsa ini semakin menunjukkan gelagat yang memprihatinkan dan potensial melenakan kewaspadaan nasional. *Ketiga*, sebagai konsekuensi lebih lanjut, maka praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), pertentangan, konflik, dan aksi kekerasan kerap terjadi di banyak tempat. *Keempat*, di tengah himpitan krisis, aksi kekerasan, dan degradasi moral tersebut, masalah bangsa ini kian diperparah oleh arus globalisasi yang liar dan tak terkendali.

Masalah-masalah tadi dalam pengamatan banyak pihak dikhawatirkan bisa mengancam kedaulatan dan keutuhan negara-bangsa ini, yang menuntut ditingkatkannya komitmen kebangsaan yang autentik. Berkaitan dengan hal itu semua Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab historis untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan di tengah dinamika perubahan zaman.

MUHAMMADIYAH DAN GOOD GOVERNANCE

Jika Muhammadiyah *tempo doeloe* telah berhasil menjalankan gerakan dakwah Islam sebagai kekuatan rasionalisasi, demistifikasi, dan demitologisasi, maka sekarang Muhammadiyah masih tetap dituntut memainkan peran serupa dalam corak model baru dan desain yang lebih inklusif, transformatif,

dan emansipatoris. Melalui gerakan dakwah seperti itu proyek pemberdayaan dan pencerahan bagi kemajuan umat dan bangsa kembali bisa digulirkan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk andil dalam kewaspadaan nasional.

Dalam hal ini pula konsep dakwah kultural yang dicuatkan pada saat Tanwir Muhammadiyah di Bali (2002) dan dimatangkan pada Tanwir di Makassar (2003), hemat saya, merupakan penegasan ulang (reafirmasi) bagi Muhammadiyah untuk melanjutkan risalah pergerakannya. Dakwah kultural pada dasarnya bersikap apresiatif terhadap kebudayaan dan manusia itu sendiri sebagai makhluk berbudaya untuk melakukan konservasi terhadap budaya dan tradisi yang *ma`ruf* dan melakukan inovasi agar terbentuk tradisi dan budaya yang baru dan lebih baik.³

Dalam konteks kebangsaan, dakwah kultural bisa berperan untuk menginternalisasikan nilai dan budaya baru yang lebih tangguh dan berbobot seperti yang termuat dalam prinsip-prinsip *good governance*. Sikap mental yang bermutu, etos kerja yang berkualitas, kemandirian, disiplin, solidaritas, dan nilai-nilai keadaban (*civility*) lainnya menjadi bagian yang harus dipromosikan dan diinternalisasikan melalui dakwah kultural. Gerakan moral anti-korupsi yang dilakukan Muhammadiyah juga bisa dipandang sebagai bagian

³Selengkapnya lihat PP Muhammadiyah, 2003, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*.

dari dakwah kultural dan sekaligus relevan dengan prinsip *good governance*.

Dalam penerapan *good governance* tersebut, tidak bisa dimungkiri bahwa Muhammadiyah layak untuk ambil peran. Bukan saja sebagai penerima konsep *good governance*, tetapi juga selaku *civil society* (masyarakat madani) Muhammadiyah bisa menjadi penambah dan pengaya gagasan implementatifnya. Hal ini sangat mungkin karena sebelum muncul dan diperkenalkan istilah *good governance* itu, Muhammadiyah-paling tidak dalam beberapa aspek-sudah lama menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan organisasi dan amal usaha yang dimilikinya.

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut: Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat Madani (*Civil Society*).⁴

I. Negara berkewajiban untuk:

- a). Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
- b). Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
- c). Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*;

- d). Menegakkan HAM;
- e). Melindungi lingkungan hidup;
- f). Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

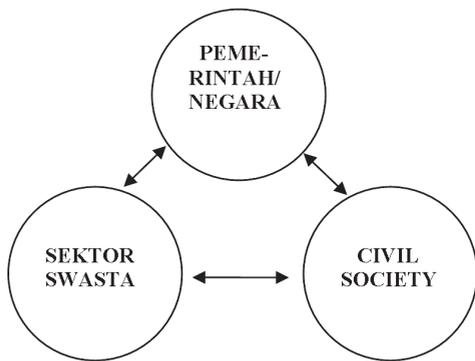
II. Sektor Swasta berkewajiban untuk:

- a). Menjalankan industri;
- b). Menciptakan lapangan kerja;
- c). Menyediakan insentif bagi karyawan;
- d). Meningkatkan standar hidup masyarakat;
- e). Memelihara lingkungan hidup;
- f). Menaati peraturan;
- g). Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
- h). Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.

III. Masyarakat Madani berkewajiban untuk:

- a). Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
- b). Mempengaruhi kebijakan publik;
- c). Sebagai sarana *checks and balances* pemerintah;
- d). M e n g a w a s i p e n y a l a h g u n a a n kewenangan sosial pemerintah;
- e). Mengembangkan SDM;
- f). Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

⁴<http://www.transparansi.or.id>



Good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya tersebut (Negara, Sektor Swasta, dan *Civil Society*) berfungsi secara baik. Negara dengan birokrasi pemerintahannya harus mengubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Sektor swasta harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya di luar negara. Terakhir, keterlibatan dan peran organisasi kemasyarakatan atau *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang.⁵

Dalam hal inilah Muhammadiyah--selaku *civil society*--harus bersikap tegas dan belajar kembali menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yakni: menegakkan supremasi hukum; transparansi; peduli pada pemangku kepentingan; kesetaraan; efektivitas dan efisiensi; serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip *good governance* ini sebetulnya akan memperoleh afirmasi dari nilai dan

budaya organisasi yang dimiliki Muhammadiyah. Bahkan budaya organisasi dan modal sosial-spiritual di kalangan Muhammadiyah bukan tidak mungkin dapat menjadi nilai tambah dan penguat prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Dalam konteks ini Muhammadiyah merupakan salah satu pilar *good governance* dari unsur *civil society*.

Penggunaan terma masyarakat madani atau *civil society* dalam konteks gerakan Muhammadiyah merupakan sesuatu yang perlu memperoleh respons yang seksama, khususnya bagi terwujudnya *good governance*. Menurut Ernest Gellner, *civil society* atau masyarakat madani merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara. Meskipun tidak menghalangi negara dari kewajibannya untuk memenuhi peranannya sebagai penjaga perdamaian dan wasit dari berbagai kepentingan besar, tetapi masyarakat madani dapat menghalangi negara untuk melakukan dominasi dan atomisasi terhadap masyarakat.⁶

Bagi Muhammadiyah istilah masyarakat madani merupakan sebuah *emphasis* yang memiliki argumentasi ideologis dan sosiologis. Secara ideologis, masyarakat madani bisa menjadi representasi dari salah satu tujuan Muhammadiyah

⁵Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation, hlm. 182.

⁶Ernest Gellner, 1995, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, hlm.9.

untuk mewujudkan masyarakat utama atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (MIyS).⁷ Dalam naskah-naskah resmi yang bertalian langsung dengan ideologi dan *khittah* gerakan Muhammadiyah disebutkan pentingnya hidup bermasyarakat yang menerapkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama, baik dalam dimensi vertikal (*hablun minal-Lahi*) maupun dalam dimensi horizontal (*hablun minan-Nasi*).

Kemudian secara sosiologis, masyarakat madani terkait dengan perubahan sosial dan transformasi masyarakat dalam sistem, institusi, dan fungsi sosial yang lebih religius, humanis, demokratis dan *civilized*. Di samping itu, masyarakat madani, sebagaimana tadi dikatakan Gellner, merupakan kekuatan penyeimbang bagi peran negara yang dominan dan kekuatan pengontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Karena di dalamnya *include* gerakan demokrasi, maka dalam konteks yang lebih luas masyarakat madani menjadi salah satu alternatif gerakan dalam menyiasati globalisasi yang hegemonik--sebagai kendaraan neo-liberalisme yang memuat kepentingan-kepentingan (ekonomi, politik, budaya, dsb.) dari negara-negara maju. Dengan demikian, keberadaan masyarakat madani dewasa ini menjadi penting

dan mendesak untuk diseriisi oleh Muhammadiyah, agar umat Islam secara mandiri dan percaya diri bisa terlibat dalam menentukan muatan dan arah pembangunan bangsa dengan prinsip-prinsip *good governance*-nya.

PENUTUP

Berdasarkan paparan tersebut, maka dari perspektif sejarah, penguatan iman dan gagasan kemajuan untuk kebangunan umat dan kemajuan bangsa yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah pada awal abad ke-20 bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi Muhammadiyah dan organisasi otonomnya dewasa ini untuk melanjutkan partisipasi dalam memperkokoh komitmen kebangsaan. Begitu juga dengan prinsip-prinsip nilai gerakan Muhammadiyah--sebagai *civil society*--yang berorientasi keumatan dan kebangsaan serta berdimensi kerisalahan dan kerahmatan, bisa menjadi pendorong dan pendukung bagi terwujudnya *good governance* di berbagai lembaga dan sektor.

Berbagai bentuk ide dan wacana pemikiran, program kerja, agenda gerakan, dan amal usaha Muhammadiyah selama ini yang dikhidmatkan untuk kepentingan bangsa itu merupakan manifestasi dari semangat nasionalisme sebagai *civil society*. Visi gerakan dan

⁷Pembahasan yang cukup lengkap tentang MIYS bisa ditelaah pada Sudibyo Markus, dkk., 2009, *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya, Sumbangan Pemikiran*, Jakarta: Civil Islamic Institute, Uhamka, dan UM Malang.

program kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan partisipasi langsung dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen kebangsaan di Muhammadiyah dibangun dengan pertimbangan politik kebangsaan, bukan politik praktis sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik. Dengan demikian, model program dan agenda gerakan yang direalisasikan oleh Muhammadiyah bisa menjadi modal sosial bagi bangsa ini untuk proaktif bagi penerapan *good governance*.

Secara langsung, nilai dan budaya baru yang lebih berbobot tadi juga akan berperan dalam pembentukan karakter bangsa sebagai kesadaran sikap serta manifestasi kepedulian terhadap negara-bangsa ini. Kultur yang

memberikan tekanan pada partisipasi rasional di dalam struktur-struktur input politik dan proses sosial lainnya itu dalam banyak hal sejalan aksentuasi gerakan Muhammadiyah dalam proses penyadaran, pemberdayaan, dan pencerahan bangsa.

Dengan demikian, kualitas bangsa dengan integritas kepribadian yang selalu tanggap, waspada dan peduli seperti itu akan menjadi modal sosio-kultural yang berharga untuk hidup secara merdeka, berdaulat, dan berwibawa. Modal dasar yang bertumpu pada kualitas sumberdaya dan integritas kepribadian bangsa seperti itulah yang akan menjadi daya hidup bangsa ini di era globalisasi. Inilah, antara lain, komitmen Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan dan *good governance* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2000. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan.
- Bahtiar, Asep Purnama, 2004, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPPI UMY.
- Ali, A. Mukti, 1991, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan.
- Calhoun, Craig (Ed.), 2002, *Dictionary of The Social Sciences*, New York: Oxford University Press.
- Gellner, Ernest, 1995, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan.
- Sudibyo Markus, dkk., 2009, *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya, Sumbangan Pemikiran*, Jakarta: Civil Islamic Institute, Uhamka, dan UM Malang.

PP Muhammadiyah, 2003, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*.

-----, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01/2005.

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation

<http://www.transparansi.or.id>